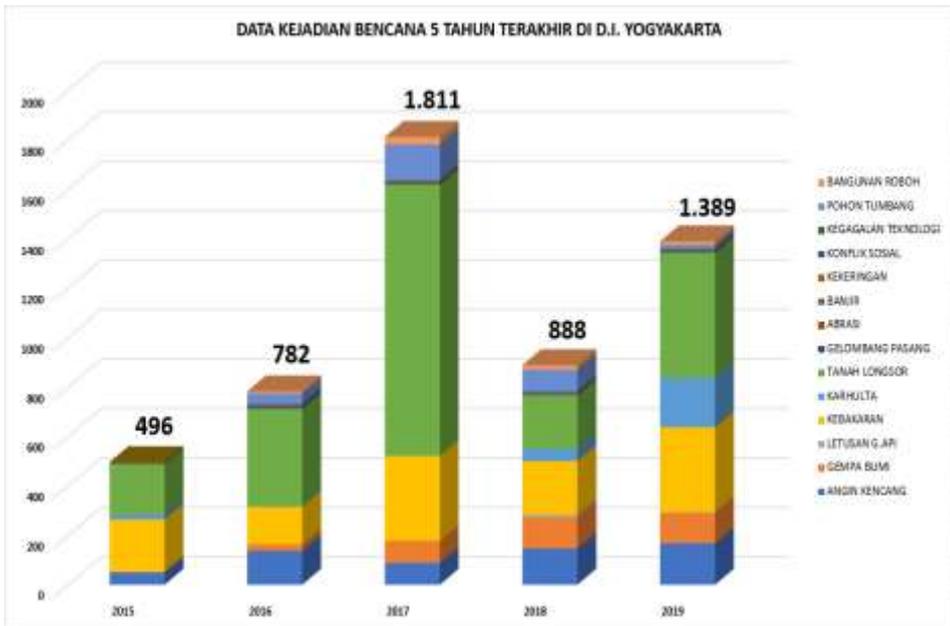


A. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Trend kejadian bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik berdasar data series kejadian bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2015-2019 untuk 14 jenis ancaman bencana. Pada tahun 2016 terdapat 782 bencana, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 1811 kejadian bencana, dan pada tahun 2018 turun terdapat 888 kejadian bencana kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 1389 kejadian.

Tabel -1 Trend Bencana di Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2019



Sumber: BPBD DIY 2019

Sepanjang tahun 2019, wilayah DIY secara umum dapat dikatakan tidak ada kejadian yang dapat dikategorikan sebagai bencana untuk tingkat provinsi meskipun kekeringan melanda sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Total nilai kerusakan dampak bencana terdapat peningkatan yang cukup besar pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Pada tahun 2017 nilai kerusakan sebagai dampak siklon cempaka sejumlah Rp. 520.734.985.600,-.

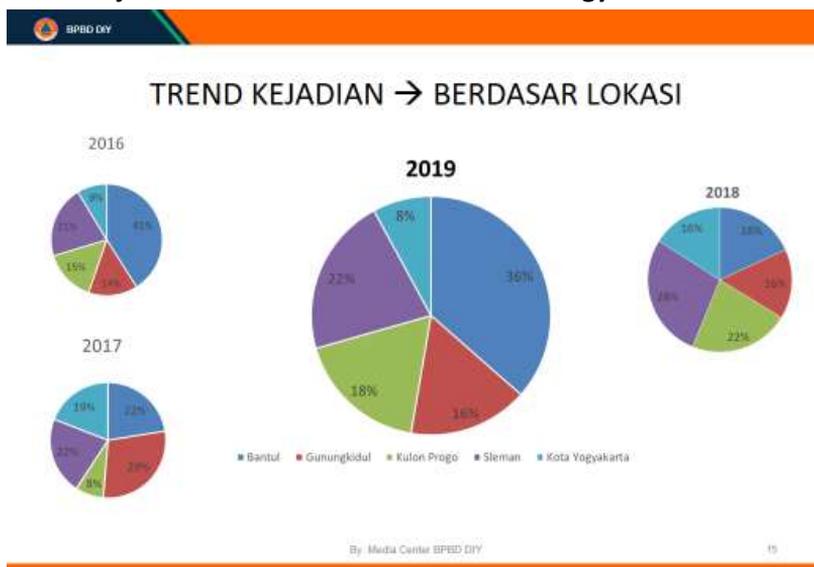
2. Status Bencana (nasional, regional/provinsi atau lokal/kabupaten/kota)

Pada tahun 2019 tidak ada SK Pernyataan Keadaan Darurat tingkat provinsi dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan sedangkan Kabupaten Kulonprogo menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan.

Pada sebagian besar upaya respon kejadian bencana tersebut, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mengerahkan tenaga/relawan dan menyalurkan persediaan bantuan logistik ke kabupaten/kota yang diperlukan sesuai kebutuhan pada saat kabupaten/kota.

Secara kewilayahan, bencana alam terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2019 bencana alam lebih sering terjadi di Kabupaten Bantul sebesar 36 % dan di Kabupaten Sleman sebesar 28 %, dibandingkan pada tahun 2018 kejadian bencana terbesar pada Kabupaten Sleman sebesar 28% dan tahun 2017 kejadian bencana terbesar di wilayah Gunung Kidul sebesar 29 %.

Tabel -2 Kejadian Bencana di Daerah IstimewaYogyakarta Tahun 2019



Sumber: Olah Data BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2019, alokasi anggaran yang dikelola dalam penyelenggaraan Sub Urusan Penanggulangan Bencana sepenuhnya bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 89.848.249.543,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 2.939.278.013,- dan Belanja Langsung Rp. 86.908.971.530,- yang dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 84,34% dari total anggaran yang dialokasikan. Sehingga capaian kinerja anggaran pada tahun 2019 sebesar 83,94% dari total anggaran belanja yang dialokasikan dan capaian kinerja fisik sebesar 99,07%.

Perbedaan besar pada kinerja keuangan dan fisik dikarenakan adanya sisa lelang dari dana hibah dari pusat yang menyebabkan sisa anggaran belanja langsung 2019 sebesar Rp. 11.508.066.104,- dan akan dianggarkan kembali untuk kegiatan tahun 2020 sebesar 10.405.211.413,-. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk penanganan kerusakan-kerusakan akibat dampak Siklon Tropis Cempaka yang belum teranggarkan pada tahun sebelumnya.

Untuk capaian kinerja fisik yang tidak tercapai 100%, hal ini disebabkan adanya pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengembangan EWS Terintegrasi Tahap ke-2 (Komunikasi Kebencanaan Terpadu – Pembangunan jaringan Komunikasi radio digital berbasis seluler) sebesar Rp. 1.200.000.000,- dikarenakan adanya regulasi dari Kementerian Perindustrian Nomor 108/m-IND/per/11/2012 tentang aturan peralatan teknologi informasi yang harus mendapat ijin khusus untuk dapat digunakan di Indonesia. Sehingga apabila pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan maka peralatan EWS tersebut tidak dapat digunakan di Indonesia.

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya potensi bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Risiko menghadapi bencana alam dan kerentanan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang

tinggi mengisyaratkan perlunya perencanaan pengurangan risiko bencana yang lebih serius dan tertata.

Potensi bencana yang ada, baik yang diakibatkan oleh alam, non alam, maupun gejala sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kerentanan masyarakat yang tinggi (rendahnya tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat), memerlukan upaya peningkatan kapasitas, guna mengurangi risiko terhadap bencana.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menurunkan risiko bencana. Ketercapaian tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator berupa angka Indeks Risiko Bencana, yang mempunyai Formula Penghitungan: Risiko merupakan Fungsi dari Ancaman x Kerentanan x $1/\text{Kapasitas}$ $R = f(H*V/C)$. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi strategi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan risiko bencana.

Ada 3 faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Kapasitas merupakan faktor yang layak (*feasible*) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit diubah dalam jangka waktu 5 tahun pembangunan.

Kerentanan sebagai salah satu faktor dalam penghitungan indeks risiko bencana sebagian dipengaruhi oleh kondisi fisik suatu wilayah sehingga berdasar hasil kajian ditetapkan menjadi wilayah rawan bencana, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wilayah rawan bencana sebagai berikut:

1. Kawasan rawan bencana letusan Gunung Merapi di Lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman
Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah sekitar sungai yang berhulu di Puncak Merapi
2. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul
Gerakan tanah/bantuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul
3. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo
Banjir terutama berpotensi mengancam daerah Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul
4. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo
Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst
5. Kawasan rawan bencana angin topan
Bencana alam akibat angin topan berpotensi terjadi di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan daerah-daerah di Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah Perkotaan Yogyakarta
6. Kawasan rawan gempa bumi
Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudera Indonesia yang berada disebelah Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, secara geologi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi
7. Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (Khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 meter dari permukaan laut

Langkah-langkah prioritas BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir risiko dengan meningkatkan ketahanan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui Destana/Katana dan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
2. Penguatan sistem peringatan dini baik yang berbasis masyarakat maupun teknologi pada wilayah rawan bencana melalui pembangunan dan pengembangan EWS/ Sistem Peringatan Dini terintegrasi
3. Penguatan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan melalui pengembangan pemanfaatan TI
4. Menyusun kajian-kajian kebencanaan untuk pengurangan risiko
5. Memberdayakan forum/jaringan/kemitraan antar-lembaga untuk pengurangan risiko bencana terutama melalui FPRB dan klaster-klaster PB
6. Pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dan aman (*build back better and safer*) berbasis pengurangan risiko bencana

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya tersebut menjadi kinerja utama atau indikator sasaran BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu indeks ketahanan daerah. Faktor-faktor utama yang menjadi penentu dalam peningkatan indeks ketahanan daerah adalah komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD merupakan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 yang kemudian dikuatkan di Perda nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan pemerintah daerah. Sesuai Pasal 78 Perda Nomor 3 Tahun 2015 OPD ini bertugas:

- a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh
- c. melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah sumber daya aparatur PNS di BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai keadaan per 31 Desember 2019 adalah 47 orang, yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Dari 46 orang sumber daya aparatur PNS tersebut termasuk 15 orang pejabat struktural.

Kualifikasi Pendidikan:

S2	: 13 orang
S1	: 20 orang
SLTA	: 14 orang

Pangkat dan Golongan:

Golongan IV	: 10 orang
Golongan III	: 30 orang
Golongan II	: 7 orang

7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Tidak Ada.

8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Berdasarkan Dokumen RPB dan RAD yang telah disusun pada tahun 2017 dan dikuatkan dengan Kajian Indeks Risiko Bencana pada tahun 2019, indeks bahaya seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi bencana yang sangat bervariasi pada masing-masing jenis bencana dari tingkat bahaya rendah, sedang hingga tinggi. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki tingkat bahaya tinggi adalah banjir bandang, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi,

letusan gunungapi, kebakaran hutan dan lahan serta tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan parameter yang digunakan oleh BNPB, yaitu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional, didapatkan indeks bahaya dan peta bahaya untuk seluruh bencana yang berpotensi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara singkat potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- 1) Banjir: tingkat potensi tinggi di Kota Yogyakarta dan yang lainnya berpotensi sedang
- 2) Banjir bandang: ada 3 (tiga) kabupaten yang berpotensi tinggi, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul
- 3) Gelombang Ekstrim dan Abrasi: ada 3 (tiga) kabupaten yang berpotensi sedang, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul
- 4) Kekeringan: Kabupaten Gunungkidul berpotensi tinggi, dan 4 lainnya berpotensi sedang
- 5) Letusan Gunungapi: potensi tingkat tinggi ada di Kabupaten Sleman
- 6) Cuaca Ekstrim: seluruh wilayah berpotensi sedang
- 7) Tanah Longsor: 4 kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi tinggi
- 8) Gempa bumi: seluruh wilayah berpotensi sedang-tinggi (Kulon Progo dan Gunungkidul berpotensi sedang sedang 3 lainnya berpotensi tinggi)
- 9) Tsunami: 3 kabupaten yang berpotensi tinggi adalah Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul
- 10) Epidemik dan Wabah Penyakit: seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi rendah
- 11) Kegagalan Teknologi: ada 4 kabupaten/kota yang berpotensi tinggi yaitu Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Yogyakarta
- 12) Kebakaran Hutan dan Lahan: potensi tinggi ada di Kabupaten Kulon Progo dan potensi sedang ada di 3 kabupaten lainnya yaitu Bantul, Sleman, dan Gunungkidul

Selain potensi bencana yang harus dihadapi akan tetapi juga permasalahan internal berupa regulasi dan kelembagaan, sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada.
- b. Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana / Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana
- c. Banyaknya kawasan rawan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana
- d. Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya
- e. Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta
- f. Belum ada pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
- g. Belum tersedianya lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana/ KRB III
- h. Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Solusi

- a. Penyusunan pedoman dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana /SPAB mandiri serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas destana
- c. Perlunya semua kawasan rawan bencana terpasang sistem peringatan dini bencana
- d. Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta

- e. Melakukan GerTRAP (Gerakan Tangkap Resapkan Alirkan dan Pelihara) air hujan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta
- f. Perlu disusun kajian pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan
- g. Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana/ KRB III
- h. Melakukan kajian rawan bencana di kawasan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta



TANTANGAN 2020	<ul style="list-style-type: none"> • ERUPSI MERAPI → Status saat ini Waspada • BANJIR LAHAR HUJAN → Waktunya Panjang • KEBAKARAN → Kasus selalu banyak • LONGSOR → Kasus Selalu banyak • ANGIN KENCANG → Kasus Selalu Banyak • KEKERINGAN → Kurun waktu Panjang • BANJIR → Puncak musim hujan & Siklon • GELOMBANG TINGGI → Kesadaran masyarakat • GEMPA & TSUNAMI → Belum dapat diprediksi + Sesar Opak, NYIA, dll • KEBAKARAN LAHAN → Musim kemarau panjang • KEGAGALAN TEKNOLOGI → Multi sektoral • KONFLIK SOSIAL → Kultur
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By Media Center BPBD DIY 39

B. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau Lainnya)

Gangguan Yang Terjadi

- Masih adanya kelompok separatis di beberapa daerah tertentu yang akan memanfaatkan momentum pemilihan umum dalam melancarkan aksinya
- Kebebasan menyatakan pendapat yang berlebihan melalui berbagai media dan meluaskan penggunaan media sosialnya untuk agitasi, provokasi dan propaganda negatif termasuk berita *hoax* yang berpotensi menimbulkan intoleransi di masyarakat
- Munculnya potensi konflik sosial yang berlatar belakang politis, terlebih lagi menjelang pemilihan umum
- Masih adanya potensi konflik sosial yang berlatarbelakang ekonomi, sosial, budaya, SARA, sengketa batas wilayah dan sengketa sumber daya alam
- Kasus-kasus menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2019, antara lain:

No	Dimensi	Kasus
1	Ideologi	<ul style="list-style-type: none">- Pembubaran bakti sosial sebuah Gereja Katolik di Bantul oleh sekelompok orang mengatasnamakan organisasi masyarakat tertentu- Penolakan kegiatan Sedekah Laut oleh sekelompok orang- Penyerangan oleh seseorang di Gereja Santa Lidwina, Bedog- Pemotongan nisan berbentuk salib di Kotagede- Pembakaran pos polisi oleh sekelompok massa saat aksi May Day- Penangkapan terduga teroris di Temon, Mlati, Depok, Bantul dan Godean
2	Politik	<ul style="list-style-type: none">- Bentrokan pendukung Partai PPP dengan PDIP- Perusakan alat peraga kampanye Partai

No	Dimensi	Kasus
		Berkarya dan PDIP oleh orang tak dikenal
3	Ekonomi dan sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Demonstrasi oleh ratusan supir bentor menuntut izin operasi di Malioboro - Penolakan pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo - Bentrokan pendukung fanatik klub sepakbola - Masih banyaknya kasus <i>klithih</i> di Yogyakarta

2. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani

Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 51 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

Kualifikasi Pendidikan:

S2	: 7 orang
S1	: 15 orang
D3	: 2 orang
SMA	: 24 orang
SMP	: 1 orang
SD	: 2 orang

Pangkat dan Golongan:

Golongan IV a/ Pembina	: 1 orang
Golongan III d/ Penata Tk I	: 3 orang
Golongan III c/ Penata	: 1 orang
Golongan IV	: 8 orang
Golongan III	: 31 orang
Golongan II	: 11 orang
Golongan I	: 1 orang

Menurut Jabatan:

Eselon II	: 1 orang
Eselon III	: 5 orang
Eselon IV	: 8 orang
Fungsional Umum	: 37 orang
Jumlah	: 51 orang

4. Penanggulangan dan Kendalanya

- Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian perseteruan antar umat beragama, antar suku antar etnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat dengan pengusaha, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat, sehingga potensi konflik sosial yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus diantisipasi sedini mungkin
- Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini
- Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta berkerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota, forum-forum kemitraan dan pihak kepolisian memaksimalkan program pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan lembaga organisasi yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pencegahan konflik sosial dapat diatasi bersama-sama
- Kepala Daerah selaku ketua tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretaris Daerah (selaku wakil ketua I tim terpadu Penanganan Konflik Sosial) untuk meningkatkan koordinasi aktif dengan unsur tim terpadu serta meningkatkan intensitas pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial
- Kepala Daerah selaku ketua tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretaris Daerah (selaku wakil ketua I tim terpadu Penanganan Konflik Sosial) memberikan fasilitasi terhadap tim terpadu penanganan konflik sosial melalui peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah daerah
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangannya

Aparat keamanan baik itu dari unsur TNI maupun Kepolisian bersama unsur Pemerintah maupun Pemerintah Daerah selalu berperan aktif dalam upaya penanggulangan potensi konflik yang terjadi di masyarakat.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Upaya antisipasi gangguan ketertiban dan keamanan secara khusus dialokasikan melalui anggaran APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kegiatan Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar Rp. 3.982.923.450,- pada Tahun Anggaran 2019.